

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Latief, M. (2007). *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)* (Jilid II). Komisi Hukum Nasional RI.
- Abdullah, M., & Ahmad, R. (1983). *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana II*. Rajawali Pers.
- Chazawi, A. (2019). *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Media Nusa Creative.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum, Liberty*. Liberty.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2016). *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*. PT. Alumni.
- Harahap, M. Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Zahir Trading.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan Kembali*. Sinar Grafika.
- Huda, C. (2006a). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada.
- Huda, C. (2006b). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan (Cetakan ke-2)*. Kencana.
- Ibrahim, A. (2021, Oktober 26). *Pengertian Handphone, Sejarah, dan Fungsinya*.
- Kuffal, H. M. A. (2003). *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*. Universitas Muhammadiyah.

- M. Husen, H. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Mahkamah Agung. (2011). *Makalah Rakernas*.
- Mahkamah Agung, P. (2010). *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan* (Cetakan 1). Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan - Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung, P. (2012). *Penegakan Hukum Pidana "Illegal Mining" Penelitian Asas, Norma dan Praktek Penerapannya* (Cetakan 1). Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan - Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahmud Marzuki, P. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. PT. Kharisma Putra Utama.
- Manan, A. (2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana Prenada Media Group.
- Matalatta, A. (1987). *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Pusat Sinar Harapan.
- Mertokusumo, S. (2013). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Putra Harsa.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. PT. Alumni.
- Nawawi, B. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti.
- O.S. Hiariej, E. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka.

- Priyatno, A. (2004). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Cv. Utomo.
- Purnomo, B. (1982). *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ruba'I, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative.
- Ruli, & Nasrullah. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Kencana Prenadamedia Group.
- Saleh, R. (1982). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*. Ghalia Indonesia.
- Saleh, R. (2001). *Asas-asas Hukum Pidana*. Gajah Mada.
- Saleh, W. (1998). *Kehakiman dan Keadilan*. Ghalia Indonesia.
- Sasangka, H., Suharjanto, T., & Rosita, L. (1996). *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Dharma Surya Berlian.
- Satrawidjaja, S. (2002). *Hukum Pidana I*. Amrico.
- Sianturi, S. R. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* (Cetakan Ke-2). Alumni AHAEM PTHAEM.
- Sianturi, S. R., & Kanter, E. Y. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika.
- Simanjuntak, O. (1999). *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*. Sumber Ilmu Jaya.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Sjawie, H. F. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media Group.

- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Rajawali.
- Soekanto, S. (1993). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Suhariyanto, B. (2019). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Rajawali Pers.
- Suparni, N. (2009). *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Sinar Grafika.
- Wisnubroto, A. (2014). *Praktik Persidangan Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Yurizal. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*. Media Nusa Creative.

B. JURNAL

- Amir Piliang, Y. (2012). Masyarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial. *Jurnal Sosioteknologi*, 27.
- Alweni, M. K. (2019). Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. *Lex Crimen*, 8(3).
- Bawekes, J. (2013). Integrated Criminal Custice System Terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan. *Lex Crimen*, 2(7).
- Chris Talinusa, S. (2015). Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *Lex Crimen*, 4(6).
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.

- Gulo, N. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215–227.
- Hsb, A. M. (2017). Mengkritisi pemberlakuan teori fiksi hukum (criticising enactment of law fiction theory). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 251–264.
- Indawati, S. D. (2015). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan. *Verstek*, 5(2).
- Irmawanti N, Arief B. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2).
- Karamoy, I. (2022). Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur/Samar-Samar (Obscuur Libeli) Yang Mengakibatkan Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum (Van Rechtswege/Null and Void). *Lex Privatum*, 10(4), 1–12.
- Mulyani, S. (2017). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (*Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 337. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.337-351>
- Mustika, E. A. A., & Wahyuni, S. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 317/PID. SUS/2019/PN. PDG). *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM*, 1(2), 137–148.
- Mutiaramadani, R. K. A. (2014). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Sarjana Ilmu Hukum*, Februari 2014.

Rizhan, A. (2023). Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan *Public Trust* terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum). *Kodifikasi*, 5(1), 1–15.

Shandy Utama, A. (2019). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306–313.

Sulolipu, A. I. D. (2019). ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI PESAN SINGKAT. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(1).
<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/26>

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :359/Kma/Sk/XII/2022 Tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung.

D. INTERNET

Indonesia, K. B. (28 Oktober 2022). *Peras*. Diambil kembali dari kbbi:
<https://kbbi.web.id/peras>

Indonesia, K. B. (2 Juni 2023). *Transmisi*. Diambil kembali dari kbbs: <https://kbbs.web.id/transmisi>

Kemenkumham, H. (2023, Maret 9). Diambil kembali dari Terapkan Integrated Criminal Justice System Dalam Penanganan Perkara Pidana di Papua: https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5522:terapkan-integrated-criminal-justice-system-dalam-penanganan-perkara-pidana-di-papua&catid=268&Itemid=73&lang=en

Nurita, A. (2022, Maret 24). Diambil kembali dari Berlaku Sopan di Pengadilan Ringankan Hukuman, ini Faktanya: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14847/Berlaku-Sopan-di-Pengadilan-Ringankan-Hukuman-Ini-Faktanya.html>

Salis, C. (2023, Juni 08). Diambil kembali dari Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim: <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>

Syafitri, D. (2021, Maret 22). Diambil kembali dari Pengenalan Aspek Society 5.0.: <https://komahi.uai.ac.id/pengenalan-aspek-society-5-0-disko-vol-4/>